

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA
BATAM (STUDI PADA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI KECAMATAN SAGULUNG)**

SKRIPSI



Oleh :

**Ade Warni Rahmadani Siregar
151010057**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA
BATAM (STUDI PADA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI KECAMATAN SAGULUNG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh :

**Ade Warni Rahmadani Siregar
151010057**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Warni Rahmadani Siregar

NPM : 151010057

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul :

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sagulung) adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



ADE WARNI RAHMADANI SIREGAR
151010057

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA
BATAM (STUDI PADA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI KECAMATAN SAGULUNG)**

SKRIPSI

**Salah satu syarat untuk memenuhi
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Ade Warni Rahmadani Siregar
151010057**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti di bawah ini**

Batam, 22 January 2021



**Karol Teovani Lodan , S.AP., M.A.
Pembimbing**

ABSTRAK

Menurut pantauan dilapangan, saat melakukan verifikasi data di Dinas Sosial Studi Kasus Kecamatan Sagulung diketahui sangat banyak yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Proram Penanggulangan Kemiskinan yang dimana salah satu dari program penanggulangan kemiskinan di Kota Batam Ini khususnya di Wilyah Kecamatan Sagulung adalah Program Keluarga Harapan Yang artinya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan. Dalam penyelenggaraan PKH di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasusya Di Kecamatan Sagulung dan menggambarkan untuk mengimplementasi penerpan Program Keluarga Harapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya berjalan efektif tetapi belum berjalan efisien karena manfaatnya belum didistribusikan secara merata. Proses pendataan yang kurang tepat menyebabkan di tukarnya bantuan yang belum tepat sasaran di masyarakat, Faktor yang menghambat pnyelenggaraannya yakni antara lain masih ada juga Keluarga Penerima Manfaat yang tidak berkomitmen memenuhi tugas dan kewajiban mereka karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan Pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat tersebut. Serta masih ada yang kurang dalam pemeriksaan ulang oleh penyelenggara kebijakan di kelurahan terkait data daftar penerima bantuan yang dikirim oleh pusat apakah mereka yang di daftar tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Meski demikian, untuk jangka panjang Program Keluarga Harapan diharapkan dapat membuat perubahan signifikan terhadap kehidupan warga miskin ke arah yang lebih baik dalam hal pendidikan dan kesehatan .

Kata Kunci: Implementasi;Kebijakan;Kemiskinan;Keluarga Harapan.

ABSTRACT

According to observations in the field, when verifying data at the Special Social Service Office in the Sagulung District Area, there were very many who were not on target. This research was conducted to analyze the Implementation of a Poverty Reduction Program in which one of the poverty reduction programs in Batam City Especially in the District of Sagulung is the Hope Family Program which means the Poverty Reduction Program through the provision of cash assistance to very poor families based on terms and conditions has been established. In the implementation of PKH in the Social Service Specifically in Sagulung District and illustrating the inhibiting factors for implementing PKH implementation. This type of research is qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation is effective but has not run efficiently because the benefits have not been distributed evenly. Inappropriate data collection process has led to the discovery of assistance that has not been right on target in the community. Factors that hinder its implementation include, among others, KPM that are not committed to fulfilling their duties and obligations due to lack of awareness of the importance of health and Education for Beneficiary Families. And there are still lacking in re-examinations by policy organizers in the kelurahan regarding data on the list of beneficiaries sent by the center whether those listed are in accordance with the specified criteria. However, for the long term, the PKH Program is expected to make significant changes to the lives of the poor towards better education and health.

Keywords: *Beneficiary Families; Implementation; Poverty; Policy.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena kelimpahan Rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sagulung)” tepat pada waktunya dengan baik. Adapun penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar S1 Universitas Putera Batam. Selama Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan) penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.S.I. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr.Hendri Herman, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Dr.Hendri Herman, S.E.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP., M.A.P. selaku pembimbing yang sangat sabar dan selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar Universitas Putera Batam, yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan motivasinya.
7. Bapak Reza Khadafi,SSTP.M.PA selaku Camat yang telah bersedia mengizinkan penulis melakukan penelitian di Dinas selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Sagulung, yang telah bersedia membantu penulis dalam penyusunan skripsi selama melakukan penelitian di Kantor Camat Sagulung.
8. Ibu Dian Wiris dan Ibu Rika Oktavia selaku Pendamping PKH di Kecamatan Sagulung serta Ibu Nizam, Ibu Rwindi dan Ibu Samsina selaku Keluarga Penerima Manfaat yang telah bersedia memberikan kesempatan dan waktunya untuk membantu penulis dalam segala hal selama melakukan penelitian di Kecamatan Sagulung.
9. Kedua Orang Tuaku ayahanda Pardamean Siregar dan Ibunda Ernida Rambe serta adik dan kakaku Yuli Kesuma Astuti Siregar dan Fitriani siregar yang sangat Sayangi Dan selau ada Dalam Doaku dan yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta selalu mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
10. Untuk sahabat tercintaku yang tidak bisa di sebut namanya satu persatu yang tak pernah bosan mendengarkan segala keluhanku, tetap bersedia memberiku semangat, motivasi serta dukungan agar penulis tidak putus asa menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman di Universitas Putera Batam program studi Administrasi Negara angkatan 2015 yang selalu menghibur, memberikan semangat yang luar biasa dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.
12. Serta seluruh pihak yang memberikan masukan, kritikan serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Amin.
13. Serta untu Ibotku Khoirul Sormin dan tulang Fahmi Rambe yang Berkenan dan suka rela membantu saya dalam Penyusunan Skripsi ini , Semoga Allh Membalas Kebaikan kalian Di gantikan dengan Pahala. Aamiin Ya Robbal alamin.
14. Serta Terimakasih juga kepada Dosen Administrasi Negara diantaranya ada Bapak Timbul Timbol Dompok, S.E., M.Si. , Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. , dan Bapak Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kelancaran penyusunan skripsi. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Batam, 22 Januari 2021



Ade Warni Rahmadani Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Dasar	8
2.1.1 Kebijakan Publik	8
2.1.2 Implemenetasi Kebijakan	12
2.1.3 Pendekatan Rasional Top down	13
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Sumber Data	28
3.4 Teknik pengumpulan Data	29
3.5 Metode Analisis Data	30
3.6 Keabsahan Data	31
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitan	34
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	34
4.1.1.1 Kedudukan Tugas Pokok,Fungsi dan ukuran Tugas dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	34
4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	35
4.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	39
4.1.1.4 Program Keluarga Harapan (PKH)	40
4.1.1.5 Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam (Studi pada program keluarga harapan di Kecamatan Sagulung)	49

4.2	Pemabahasan	58
4.2.1	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam ..	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		63
5.1	Simpulan	63
5.2	Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model hubungan variabel Implementasi Kebijakan Edward III	16
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 3.1 Komponen dalam	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Batam	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Persentase dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Kota Batam Maret 2014-maret 2019	4
Tabel 1.2 Data keluarga Penerima Manfaat PKH	5
Tabel 3.1 Imforman penelitian Dinas Sosial	31
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	35
Tabel 4.2 Indeks dan komponen Bantuan sosial program keluarga harapan 2018 ...	48
Tabel 4.3 Indeks dan komponen Bantuan sosial kebijakan keluarga harapan 2019 .	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan yang di tegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin program keluarga harapan (PKH) yaitu program bantuan pemberian sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan miskin program penangananganan fakir miskin, memiliki komponen, kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Di dalam penanggulangan kemiskinan itu untuk membiayai tiga program pengentasan kemiskinan, yaitu program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan. Disamping itu harus terpenuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni telah terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, keluarga bermasalah, janda-janda, penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial serta pertikaian menyangkut SARA. Didalam Implementasi Program penanggualangan kemiskinan maka saya mengambil salah satu dari menaggulangi kemiskinan di kota batam yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka mendiskusikan konsep kesejahteraan lahir bathin tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan juga moral, agama, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah daerah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Sesungguhnya aspek materi dan rohani bagi kesejahteraan tidak independen satu dengan lainnya, tetapi keduanya sangat berhubungan erat.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Suharyanto, dalam Syawie, 2011). Berbicara tentang kemiskinan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen yaitu 25,14 juta Orang Sementara di penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Propinsi Kepulauan Riau pada Maret 2017 meningkat 125.370 orang. Dari data yang diperoleh tim Central Batam di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait jumlah pengangguran saat ini, Batam jelas memperlihatkan data yang fantastik dan memprihatinkan. Menurut Maudy Vera, Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Disnaker Batam, angka pengangguran di Kota Batam mulai tahun 2015-2017 relatif naik. Dimulai dari tahun 2015 angka pengangguran mencapai

14.000, pada tahun 2016 angka pengangguran semakin meningkat menjadi 16.000-20.000. Dan pada tahun 2017, jumlahnya sekitar 24.000 (Central Batam, 2017).

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2014 - Maret 2019 Jumlah penduduk miskin di Kota Batam pada Maret 2019 sebesar 66,21 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2018, maka selama setahun tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,203 ribu orang. Peningkatan atau penurunan persentase penduduk miskin sendiri salah satunya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kenaikan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 1 menyajikan perkembangan Kemiskinan dan juga Garis Kemiskinan pada Maret 2014 sampai dengan Maret 2019.

Selama periode Maret 2018 - Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,35 persen, yaitu dari Rp. 650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 659.170,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Persentase kenaikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode Maret 2017 - Maret 2018, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,94 persen atau dari Rp. 591.589,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp.650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Keadaan ini menggambarkan bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Batam secara umum pada Maret 2019 ini lebih baik dibanding dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun Garis Kemiskinan mengalami peningkatan tidak menyebabkan penduduk miskinnya menjadi lebih besar.

Tabel 1.1 Jumlah Persentase, dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Kota Batam Maret 2014- Maret 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2014	61,399	5.3	497,415
2015	59,940	5.08	525,452
2016	57,340	4.68	565,380
2017	61,161	4.81	591,589
2018	67,413	5.11	650,406
2019	66,210	4.85	659,170

(Sumber: Diolah dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas))

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di mana semakin kecil angka indeks berarti rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga semakin menyempit. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama periode Maret 2018 - Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,35 persen, yaitu dari Rp. 650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 659.170,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Persentase kenaikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode Maret 2017 - Maret 2018, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,94 persen atau dari Rp. 591.589,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp.650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Keadaan ini menggambarkan bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Batam secara umum pada Maret 2019 ini lebih baik dibanding dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun Garis Kemiskinan mengalami peningkatan tidak menyebabkan penduduk miskinnya menjadi lebih besar.

Tabel 1.2 Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

No.	KELURAHAN	JUMLAH KPM		
		2016	2017	2018
1	Tembesi	176	252	428
2	Sungai Langkai	177	263	440
3	Sungai Lekop	158	413	571
4	Sagulung Kota	204	198	402
5	Sungai Binti	301	479	780
6	Sungai Pelunggut	308	566	874
JUMLAH		1324	2171	3495

(Sumber: Rekapitulasi Data Peserta PKH Dinas Sosial, 2019)

Dari data Keluarga Penerima Manfaat banyak sekali yang harus di teliti berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di mana semakin kecil angka indeks berarti rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga semakin menyempit diatas, maka peneliti saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sagulung)”**.

1.2 RumusanMasalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam (StudiKasus Pada Program Keluarga Harapan Di KecamatanSagulung)?

1.3 TujuanPenelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan Penanggulangaan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi pada program keluarga harapan di Kecamatan Sagulung).

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu:

a) Secara Akademis

Secara Teoretis penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang keilmuan terhadap administrasi publik, agar lebih memahami dan mempunyai wawasan terhadap implementasi kebijakan publik.

2) Secara praktis :

- a) Untuk peneliti, sangat membantu dalam penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Batam (studi kasus pada keluarga harapan Kecamatan Sagulung).
- b) Untuk Pemerintah, ini dapat memberikan masukan kepada Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014: 35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan atau tidak di kerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus di lakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang di lakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam membangun secara luas.

Menurut H. Hugh Heglo (Abidin, 2012: 6) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Anderson dalam (Tahir, 2015: 21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang di lakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Kebijakan adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu : pandangan yang kedua, ialah pendapat para ahli yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan (Policy Implementation). Mereka melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mempunyai dampak dan akibat-akibat yang diramalkan (predictable), atau dapat diantisipasi sebelumnya. Seperti apa yang di kemukakan oleh Nugroho (Tahir, 2015: 26) mengemukakan kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan di beri sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi di jatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjahtukan sanksi.

Namun pada hakikatnya, bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya di lakukan dari pada apa yang di usulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini di lakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang di usulkan menjadi kurang memadai.

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Bullock et al (Anggara, 2014: 45) utuk bisa disebut sebagai kebijakan, suatu keputusan perlu di ikuti langkah tindakan pelaksanaan yang bersasaran mencapai tujuan. Oeleh karena itu, kebijakan sebagai suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini:

- a) Ketetapan, suatu kebijakan di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan tertentu yang memiliki pangsruh mengikat, baik ke dalam maupun keluar dari pembuat kebijakan.
- b) Maksud, adanya kebijakan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau mengatasi permasalahan tertentu.
- c) Keputusan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.
- d) Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah di tetapkan.

Memecahkan sebuah permasalahan yang di hadapi kebijakan publik William Dunn (Anggara, 2014: 120) mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus di lakukan, yaitu:

1. Penyusunan agenda

Agenda Setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruan untuk memaknai maslah publik dan prioritas dalam agenda publik yang di pertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam

agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah –masalah tersebut di definisikan untuk di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pihak kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi

Bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan tahap akhir, tetapi juga di lakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang di usulkan, menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu di buat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak di laksanakan. Bahkan menurut Huntington (Mulyadi, 2016: 24) perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang di buat oleh sebuah polibiro, kabinet atau presiden negara itu.

Menurut Gordon Pasolong (Mulyadi, 2016: 24) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisasikan berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat di terima dan feasibl. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang

yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat di ukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang di hadapi.

Tachjan (Tahir, 2015 : 53) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan publik, di samping dapat di pahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat di pahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

2.1.3 Pendekatan Rasional Top-down dalam Implementasi Kebijakan

1) Pendekatan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky

Karya Pressman dan Wildavsky ialah model implementasi yang pertama kali dimunculkan. Judulnya adalah implementation yang mengatakan bahwa implementasi dapat berhasil bergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Pendekatan Game Theory mungkin lebih biasa dimanfaatkan daripada teori probabilitas untuk menganalisis Implementasi. Dengan kata lain, pendekatan kolaborasi antaraktor yang terlibat biasa direkomendasikan untuk mengatasi kemacetan hubungan dalam mata rantai implementasi Bowen (Anggara, 2014:238-239).

2) Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn: Perspektif Teoretis Proses Implementasi Kebijakan

Dari pernyataan Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014:240-243) bahwa ada enam variable (kelompok variable) yang harus perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas adalah perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. Sumber daya dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi.
- c. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering kali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- d. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hirarki pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
- e. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut, apakah elite mendukung implementasi).

- f. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).

3) Pendekatan Eugene Bardach: The Implementation Game

Eugene Bardach (Anggara, 2014:244-245) hasil analisisnya dari berbagai kasus yang dia teliti tentang implementasi kebijakan dalam bukunya. Yang menyatakan bahwa proses politik dalam suatu *policy* tidak berhenti hanya pada saat penyusunannya, tetapi juga sampai pada tahap pelaksanaannya kebijakan tersebut dilaksanakan.

4) Pendekatan Christopher Hood

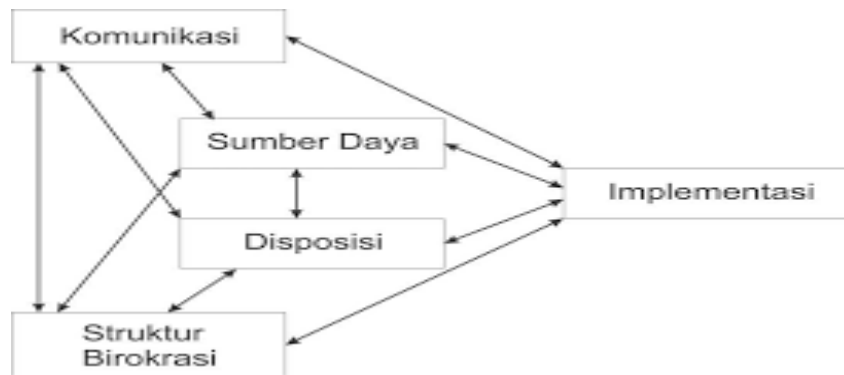
Hood dalam bukunya *Limit to administration* menyarankan lima syarat (yang merupakan keterbatasan administrasi) agar implementasi biasa berlangsung sempurna, yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi yang ideal yaitu produk dari organisasi yang padu, seperti militer dengan garis komando yang jelas.
- b. Norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas
- c. Orang-orangya dapat dipastikan akan melaksanakan hal-hal yang diminta
- d. Harus ada komunikasi yang sempurna dari dalam antar organisasi.
- e. Tidak ada tekanan waktu.

5) Pendekatan George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi

Dari Keempat Variabel ini, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan

saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.



(Sumber : Anggara, 2014 : 250)

Gambar 2.1 Model hubungan Antar variabel Implementasi Kebijakan Edward III

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi.

b. Sumberdaya

Sumber daya yang diperlukan Implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

- 1) Staf, yang jumlah kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 2) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kewenangan yaitu yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
- 4) Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan.

c. Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana – pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana.
- 2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- 3) Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure (SOP)* yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

6) Pendekatan Merilee S. Grindle: content of policy and context of implementation

a. Isi kebijakan (*Content of policy*)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi menurut Grindel adalah sebagai berikut:

1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

3) Jangkauan perubahan yang diinginkan

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dilakukan dengan konsisten.

4) Kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

5) Pelaksana program

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

6) Sumber daya yang disediakan

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

b. Konteks implementasi (*Context of implementation*)

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks

implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang di implementasikannya.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaiannya konflik mengenai “siapa yang mendapatkan apa” dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor.

2.2 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Wimmy Haliim, yang berjudul “Poverty Reduction for Extremely Poor Households of Malang City by the Implementation of Program Keluarga Harapan” yang dimuat pada Jurnal Bina Raja, 2016, 8 (2) : 331-340 ISSN 2503-3360. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah: informan kunci (implementasi program, kemiskinan, keluarga harapan). Abstrak Penelitian ini didasarkan pada rendahnya akses keluarga miskin terhadap pendidikan dasar dan layanan kesehatan di Kota Malang yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan masalah kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH telah dilaksanakan dengan baik dan

sesuai prosedur dan jumlah penerima RTSM PKH dari tahun ke tahun mengalami penurunan (Wimmy Haliim, 2016).

- 2) Muhammad Sulhan, Totok Sasongko (2017) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar pada masyarakat (Studi kasus di kelurahan Kauman Kota Malang). Jurnal ilmu Administrasi Negara Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan (Placeholder1) fenomena-fenomena yang ada baik fenomena buatan manusia maupun alamiah, fenomena itu biasa berupa bentuk aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antar fenomena yang satu dengan fenomena yang lain (Sukmadinata, 2006:72). Peneliti lakukan sosialisasi dilakukan oleh sekolah yang mana siswa kurang mampu yang mendapatkan melalui rapat sosialisasi program kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui KIP dengan kesetaraan usia 6-21 tahun, sedangkan untuk prosedur verifikasi data dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan mengajukan nomor KPS dan KIP untuk mendapatkan dana. Dengan mengajukan ke perangkat desa untuk KPS dan KIP langsung ke sekolah bersangkutan. Dalam pembagian kartu dilakukan apa bila syarat yang telah ditetapkan sudah memenuhi dan sudah terseleksi kartu KIP dan KPS tersebut dibagikan secara berkelanjutan. Dalam pencairan dana bagi yang punya kartu KIP dan KPS membuat rekening yang kemudian diberitahukan bahwa dana

bisa diambil. Tujuan penelitiannya adalah Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada masyarakat Kelurahan Kauman serta mendeskripsikan dampak implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada masyarakat Kelurahan Kauman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui pendistribusian KPS dan KIP dilakukan melalui studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian survey serta pengecekan area yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah. Berdasarkan pengelompokan masyarakat ini dilakukan oleh petugas untuk memudahkan dalam pembagian bantuan yang dimaksud kartu penjamin sosial dan kartu indonesia pintar di wilayah Kota Malang khususnya di Kelurahan Kuaman yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 560 jiwa warga miskin diantaranya yang berhak mendapatkan kartu penjamin sosial hanya 30% sedangkan kartu indonesia pintar sebanyak 5%. Sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi program-program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin (Sulhan & Sasongko, 2017).

- 3) Priska A. Matualage (2017) Dengan Judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting). Dengan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tuminting mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), maka dapat diambil sebagai berikut: a). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. nampaknya masih memiliki kendala dan masalah yang dimulai dari pendataan yang terbilang belum selektif dan belum tepat sasaran yang sebenarnya diperuntukkan bagi KSM namun belum terjangkau sepenuhnya. b). Salah satu faktor terpenting dari program PKH ini adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Matualage, 2017).

- 4) Clara Dheby, Abdul Kadir Adys, Muhammad Idris (2017) dengan Judul Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dengan Jurnal Adminstras Negara Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetil mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Hasil penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang

kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan dengan mengacu pada variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan terlaksana dengan baik. PKH bidang kesehatan telah mampu mengubah perilaku dan pola hidup sehat Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tamalate. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan dengan mengacu pada dua variabel yakni variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan belum terimplementasikan dengan baik. Program-program yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak KPM Kecamatan Tamalate tidak dilaksanakan secara maksimal (Clara, 2017).

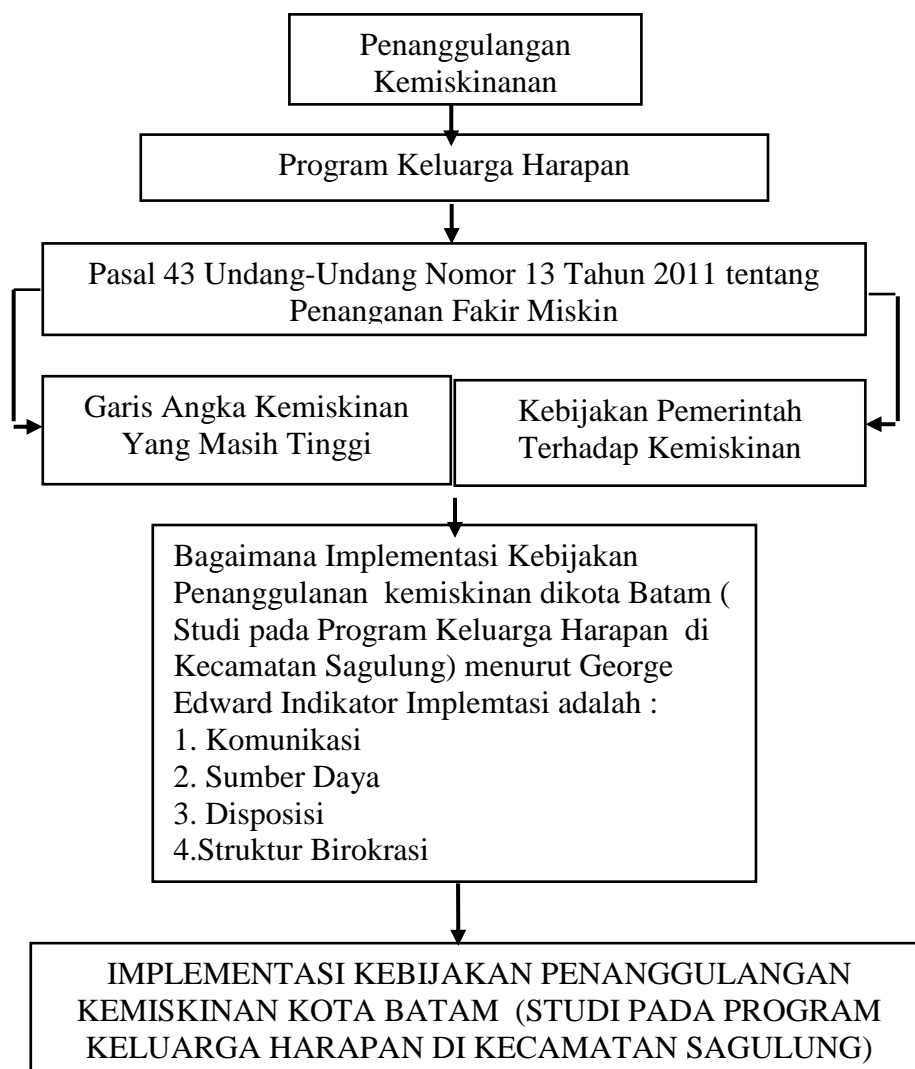
- 5) Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito,(2018) Cakti Indra Gunawan. Dengan judul penelitian implementasi pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga harapan untuk memutus rantai kemiskinan di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Dengan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di dapatkan adalah Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam PKH dapat terlaksana dengan: a).Pembenahan kualitas hidup para peserta PKH dengan memperbaiki aspek kesehatan dan pendidikan keluarga. b).Berperan aktifnya para peserta program dalam mensukseskan program ini, dimana program ini dijadikan program pemberdayaan masyarakat yang baik melalui kelompok usaha bersamanya. c).Terlibatnya

para peserta program dalam sosialisasi hal – hal yang berguna dan baik kepada masyarakat sekitarnya, hal ini menjadikan para peserta PKH menjadi pendukung kegiatan – kegiatan pemerintah secara tidak sadar (Arif & Cahyo, 2018).

- 6) Antriya Eka Suwinta (2016) dengan judul penelitian implementasi program keluarga harapan (Pkh) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Dengan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah implementasi PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian tahapan yang berjalan dengan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) PKH di Desa Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan para pelaksana di Desa Maron juga telah menjalankan tugas sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP's) serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik namun demikian dalam implementasi PKH di Desa Maron masih ditemui kendala antara lain kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH yang menyebabkan peserta PKH tidak menyadari pentingnya mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi kehidupan sehingga tujuan PKH dalam jangka pendek belum bisa (Eka Suwinta, 2016).

2.3 Kerangka Pemikiran

Misi Program Keluarga Harapan mengupayakan perubahan perilaku dan pola pikir keluarga peserta terhadap kesehatan anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan anak-anak rumah tangga sangat miskin yang pada gilirannya dapat memutus mata rantai kemiskinan.



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian tersebut digunakan karena dapat mendeskripsikan data secara teratur menurut sistem, jelas, dan teliti berdasarkan kebenaran yang ada dilapangan selama peneliti terjun langsung melakukan penelitian. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggali fakta mengenai bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan di Kota Batam.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian mendeskripsikan dan Mengimplementasikan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi pada program keluarga harapan di kecamatan sagulung) Penelitian menggunakan Fokus Penelitian menurut (Sugiyono, 2014: 209), yaitu:

1. Menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu organizing domain
2. menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk membangun iptek
3. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori yang telah ada.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2014: 215), dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Ada 2 (dua) sumber data yang di manfaatkan oleh penelitian dalam informasi yaitu:

- a) Data primer merupakan data yang di peroleh peneliti secara langsung dari pihak yang menjadi informan yang di amati dan di wawancarai merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan pemilihan informan menggunakan Proposive Sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini yang menjadi sumber yaitu Pejabat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari , Masnelly Harahap, S.Pd Kepala Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Dian Wiris Pendamping PKH, Rika Oktavia Pendamping PKH, Buk Dindin Buk Nizam dan Buk Suhani Sebagai Penerima PKH.
- b) Data sekunder merupakan sumber data dari berbagai teori dan informasi yang di peroleh secara tidak langsung, baik dari referensi buku, website, serta sebagai dokumen yang tertuang dalam website meliputi laporan kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Profil Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Secara umum dalam pengambilan data terdapat (empat) teknik pengumpulan data yaitu: Observasi Wawancara, Dokumentasi, Gabungan/Trigulasi. (Gunawan, 2013: 141), yaitu:

- a) Observasi. Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
- b) Wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini mengadakan wawancara langsung dengan informan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka pihak yang menjadi informan Penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian Dinas Sosial

Nama	Jabatan
Masnelly Harahap, S.Pd	Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Dian Wiris	Pendamping PKH
Rika Oktavia	Pendamping PKH
Bu Dindin	Keluarga Penerima Manfaat
Bu Nizam	Keluarga Penerima Manfaat
Bu Suhani	Keluarga Penerima Manfaat

- c. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, sebagai bahan tambahan buat peneliti. Peneliti menggunakan buku-buku yang mendukung dalam penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini meliputi:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

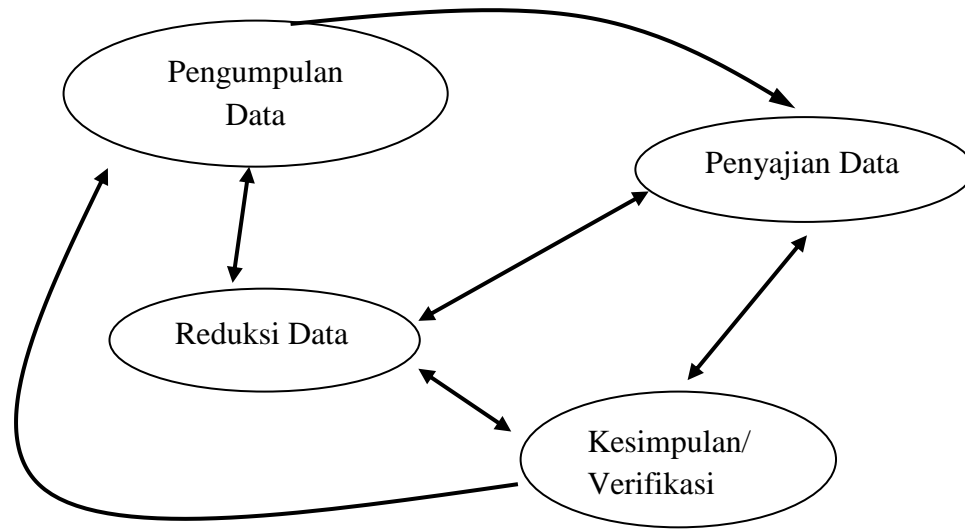
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan potonya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis Data

(Sumber: Sugiyono, 2012 : 247)

3.6 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2011: 320).

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Konsep kebergantungan lebih luas daripada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut. Kriterium kepastian berasal dari konsep 'objektivitas' menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif

sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitasnya suatu hal bergantung pada orang seorang.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan menjangkau semua stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Studi Kasusnya ada di Kecamatan Sagulung. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat dilakukan dengan baik.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pustaka																
2	Penyusunan Proposal																
3	Pengumpulan Data																
4	Penelitian Lapangan																
5	Pengolahan Data																
6	Analisis Dan Kesimpulan																
7	Penulisan Laporan Akhir																
8	Penyusunan Laporan																